



Perencanaan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Public Communication Plan by the Government of Medan City by Implementing Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Putri Fatimah, Grace Silalahi, Abdul Halim, & Dedi Sahputra

Program Studi Magister Psikologi, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan komunikasi publik pemerintah Kota Medan dalam menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan model pendekatan *Content Analysis* yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis sehingga diperoleh hasil Pemerintah Kota Medan berhasil merencanakan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat Kota Medan terkait cara pemerintah bersama masyarakat untuk menekan laju penyebaran Virus COVID-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro.

Kata Kunci: COVID-19; Komunikasi Publik; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Abstract

This study aims to determine the description of the Medan City government's public communication planning in carrying out the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) in the midst of the COVID-19 pandemic. In this study, using the library research methods and a Content Analysis approach model that is an in-depth discussion of the contents of a written information so that the results of the Medan City Government succeeded in planning and communicating to the people of Medan City regarding how the government and the community to suppress the rate of spread of the COVID-19 Virus with the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) as stated in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number: 12 of 2001 concerning the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro.

Keywords: Corona Virus Disease; Public Communication; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

How to Cite: Putri. F. Silalahi, G. Halim, A. & Sahputra, D. (2022). Perencanaan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 4(1) 2022: 32-43,

COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan Virus Corona. Pada bulan Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia. Gejala COVID-19 antara lain : demam, batuk, sesak nafas, diare, sakit tenggorokan, kehilangan indera perasa, ruam kulit (WHO-Indonesia, 2020). Virus ini mengakibatkan kematian dengan cepat. Berjuta orang terjangkiti Virus COVID-19 ini di seluruh dunia, termasuk di Kota Medan. (Isnaini dkk, 2020;Marbun dkk, 2020).

Banyak daya dan upaya yang dilakukan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini salah satunya dengan karantina wilayah atau *lockdown*. *Lockdown* merupakan sistem isolasi untuk melindungi masyarakat dari penularan virus COVID-19 (Shareef DKK, 2021). Di Indonesia kebijakan yang menyerupai karantina wilayah disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal yang membedakannya adalah pelaksanaan karantina wilayah memutlakkan warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun diluar rumah. Sedangkan, pelaksanaan PPKM bukan memiliki arti melarang warga untuk melakukan aktivitas apapun pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan angka kasus positif COVID-19. (Utami dkk, 2019;Nugroho dkk, 2020).

Pelaksanaan kebijakan PPKM di Kota Medan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188/54/20/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Sumatera Utara serta Surat Edaran Walikota Medan No : 440/4338 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019). (Saragih dkk, 2020; Atrizka dkk, 2020).

Pemerintah Kota Medan sebagai *stakeholder* yang memegang peranan penting dalam penanganan COVID-19 di Kota Medan, wajib memperlancar komunikasi publik mengenai COVID-19 kepada masyarakat mengenai pengendalian penyakit akibat Virus COVID-19, agar komunikasi publik lebih efektif hendaknya menggunakan kombinasi media digital dan konvensional. Misalnya penggunaan jalur komunikasi tradisional atau lokal, media massa, media sosial, aplikasi chat, jaringan kreatif (Ramadani, 2019).

Perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menetapkan hasil akhir yang ingin dicapai pada awal kegiatan (Wheelen & Hunger, 2004: 68), menurut Moenawar (2020), saat ini komunikasi publik pemerintah merupakan proses penyampaian ide, program, gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi dan mengantisipasi dampak COVID-19. Komunikasi publik memfasilitasi informasi, dialog, menstimulasi partisipasi, pengambilan kebijakan dan pemberdayaan publik (Moenawar, 2020).

Sistem komunikasi di Indonesia memiliki beberapa subsistem yaitu : Subsistem formil – nonformil. Subsistem formil ini bermaksud bahwa Sistem Komunikasi Indonesia secara formil merujuk pada peraturan yang mengikat yang dikeluarkan lembaga-lembaga seperti Dewan Pers yang mengikat secara khusus, di antara komunitas pers nasional. Sedangkan, subsistem nonformil bermaksud bahwa Sistem Komunikasi Indonesia secara nonformil merujuk pada penyampaian pesan antar masyarakat yang dilakukan secara tradisional, kolektivis dan individualis (Sahputra, (2020).

Dalam komunikasi publik, perlu diperhatikan 3 hal: *Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan Pesan* (Ramadani, 2019). *Transmisi* berarti komunikasi akurat, dipahami oleh komunikator pesan. *Konsistensi* berarti informasi konsisten, selaras, koheren antara satu pesan dengan pesan lainnya. *Jelas* berarti pesan disampaikan dengan bahasa sederhana, mudah dipahami publik. (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021).

Komunikasi publik di bidang kesehatan berupaya meningkatkan: (1) Kesadaran dan pengetahuan (Kognitif) publik; (2) Sikap (Afektif, perasaan, motivasi); (3) Kecenderungan perilaku (Konatif), tentang penyakit, ancaman, masalah dan solusi kesehatan. Kampanye kesehatan adalah suatu intervensi, strategi komunikasi konstruktif yang dirancang untuk mempengaruhi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Informasi kesehatan publik berisi informasi kehidupan, kematian, harapan, ketakutan, kesehatan, kemajuan, kegagalan, fakta, spekulasi dan resiko penyakit (Levi, 2000).

Ada empat pilar komunikasi publik pemerintah terkait COVID-19: (1) Himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada; (2) Koordinasi dengan instansi terkait; (3) Pemberian akses informasi ke media; (4) Pengarusutamaan gerakan “Cuci Tangan dengan Sabun”.

Berdasarkan pemaparan diatas, disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan komunikasi publik pemerintah Kota Medan dalam menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). (Izar dkk, 2020; Tarigan dkk, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan *content analysis* (kajian isi) yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, dalam hal ini peneliti menggunakan media informasi berita yang bersumber dari kompas.com.

Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data merupakan bahan tertulis yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini dapat juga disebut juga sebagai data dari tangan pertama, sumber data dalam penelitian ini adalah media massa serta media pemerintah dalam mengkomunikasikan keadaan Indonesia saat ini yaitu waspada.id, dengan durasi 06 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekundernya merupakan jurnal-jurnal atau buku-buku terkait yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPKM di Kota Medan

Guna menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188/54/20/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Sumatera Utara yang didalamnya Gubernur Sumatera Utara memberi Instruksi terhadap enam kepala daerah tingkat kota/kabupaten yang wilayahnya memiliki resiko sangat tinggi dan menjadi episentrum peningkatan kasus COVID-19. Untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan sebagai upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan mengambil langkah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan.

Adapun Pemerintah menetapkan PPKM Mikro bukan sebagai pelarangan kegiatan tetapi pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan beberapa kegiatan masyarakat dengan tujuan agar kegiatan tersebut tidak menjadi klaster baru dan sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia (Sampurno, 2020).

Pemberlakuan PPKM Mikro diatur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari dan diberlakukan sejak tanggal 11-25 Januari dan diperpanjang sampai bulan Maret 2021. Sebelum dilakukan PPKM Mikro telah dilaksanakan PPKM untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Gubernur di seluruh Indonesia termasuk Gubernur Sumatera Utara, dapat menetapkan Kota/Kabupaten lain di wilayahnya untuk dilakukan pemberlakuan pembatasan (PPKM) mikro, dengan mempertimbangkan empat parameter yang telah ditetapkan yaitu tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian rumah sakit, serta pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

Untuk mengoptimalkan pembatasan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.

Istilah yang digunakan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro. Setelah dua jilid PPKM di Pulau Jawa dan Bali dinilai tak efektif menekan laju penyebaran Covid-19, Sejak 09 Februari 2021 pemerintah memberlakukan PPKM mikro di sejumlah wilayah di 7 provinsi.

Untuk memastikan PPKM Mikro berjalan dengan optimal, dibentuk posko di tingkat desa/kelurahan yang diawasi oleh posko di tingkat kecamatan. Posko tingkat desa/kelurahan melakukan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 yang diketuai oleh kepala desa dibantu perangkat dan mitra desa/kelurahan. Mereka berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang ada di tingkat atasnya atau TNI/Polri (Peraturan Mendagri No.41 2020).

Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 merupakan dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM. Evaluasi sementara pelaksanaan PPKM sesuai Instruksi Mendagri tersebut masih ditemukan beberapa pelanggaran aturan PPKM, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan karyawannya untuk bekerja di rumah. Sanksi atas pelanggaran PPKM ditujukan pada : pimpinan daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang tidak melaksanakan ketentuan Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sanksi juga diancamkan pada orang perseorangan yang melakukan pelanggaran PPKM. Ancaman sanksi dan pelanggaran yang dimaksud bagi orang perseorangan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Aturan yang diberlakukan dalam PPKM Mikro didasarkan pada zonasi Covid-19 suatu daerah, apakah masuk zona hijau, kuning, oranye, atau merah. Pada zona merah, PPKM dilakukan hingga tingkat RT. Mulai dari penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lain yang sifatnya non esensial. Masyarakat dilarang berkumpul lebih dari 3 orang. Mobilitas warga untuk keluar masuk wilayah RT dibatasi maksimal pada pukul 20.00. Dan seluruh kegiatan kemasyarakatan di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan harus ditiadakan (Waspada, 2021).

Walikota Medan mengeluarkan kebijakan PPKM Mikro yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Medan No : 440/4338 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan terdapat sembilan himbauan Walikota Medan kepada masyarakat Kota Medan yaitu :

Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan *work from home* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

- a. Kegiatan restoran, rumah makan, cafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima, dan tempat makan minum lainnya, untuk makan minum di tempat dan untuk layanan makan minum melalui pesan antar/bawa pulang diizinkan sampai pukul 21.00 WIB.
- b. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- c. Tidak diizinkan operasional untuk tempat hiburan lainnya (klub malam, diskotek, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar, griya pijat, spa, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, dan seluruh arena permainan ketangkasan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2021.
4. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
5. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Mengizinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan untuk dilakukan secara daring/online.
7. Menutup destinasi wisata mulai 1 Juni sampai 14 Juni 2021.
8. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
9. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Dikutip dari laman SuaraSumut.id dan VIVA, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan dilaksanakan dalam beberapa waktu yaitu :

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Sumatera Utara (PPKM Mikro) dimulai dari tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dimulai dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dimulai dari tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

Dikutip dari laman msn.com, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terdapat 40 titik pos penyekatan guna membatasi mobilitas masyarakat, penyekatan ini dilakukan sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB.

Berikut daftar pos penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan yakni :

Jalan Walikota simpang Jalan Ir Juanda
Jalan Suprpto simpang Jalan Imam Bonjol
Jalan Diponegoro simpang Jalan Zainul Arifin
Jalan MH Yamin simpang Jalan Merak Jingga
Jalan Pemuda simpang Jalan Palang Merah
Jalan Brigjend Katamso simpang Jalan Alfalah
Jalan Gatot Subroto simpang Jalan Manhattan
Jalan Jamin Ginting simpang Jalan Dr Mansyur – Kampus USU
Jalan SM Raja simpang Indogrosir
Jalan HM Yamin simpang Aksara
Jalan Gajah Mada simpang Jalan Iskandar Muda bergeser ke Jalan Gajah Mada simpang Jalan S Parman
Jalan Guru Patimpus simpang Jalan Adam Malik
Jalan Brigjend Katamso simpang Jalan Ir Juanda
Jalan Brigjend Katamso simpang Istana Maimun
Jalan SM Raja depan Masjid Raya
Jalan SM Raya simpang Jalan Pandu
Jalan Asia simpang Jalan Pandu-Jalan Sutomo
Jalan Sutomo simpang Jalan HM Yamin
Jalan P Kemerdekaan simpang Jalan Gaharu
Jalan P Kemerdekaan simpang Jalan Timor
Jalan AH Nasution
Jalan Jamin Ginting – Jalan Pintu Air (Simpang Pos)
Jalan Gatot Subroto – Jalan Kapten Muslim
Jalan Setia Budi – Jalan Dr Mansyur (mengarah ke titi bobrok)
Jalan Sei Batang Hari - Jalan Sunggal
Jalan H Adam Malik simpang Jalan T Amir Hamzah
Jalan HM Yamin simpang Jalan GB Yosua
Jalan Balaikota simpang Jalan Bukit Barisan
Jalan Halat simpang Jalan SM Raja
Jalan Halat simpang Jalan AR Hakim
Jalan S Parman simpang Jalan Sudirman
Simpang Jalan Mongonsidi – Jalan Patimura
Jalan Kapten Maulana Lubis simpang Jalan Imam Bonjol
Jalan Wahidin simpang Jalan Negara
Jalan Pandu simpang Jalan Mahkamah
Jalan SM Raja simpang Pelangi
Jalan Gatot Subroto simpang Kampung Lalang

Jalan Letda Sujono (Pintu Tol Bandar Selamat)
Jalan Letda Sujono simpang Titi Sewa Tembung
Jalan Jaming Ginting simpang Tuntungan

Perencanaan Pesan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan. Perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dilakukan melalui dua komponen, yaitu organisasi dan publik. Organisasi sebagai pengelola kegiatan dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sedangkan publik adalah yang menjadi sasaran kegiatan dari organisasi tersebut adalah seluruh lapisan masyarakat.

1. Organisasi sebagai Pengelola Kegiatan

Dari hasil penelusuran kepustakaan, diketahui bahwa pada Surat Edaran Wakilota Medan No : 440/4338 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan menghimbau masyarakat untuk melakukan pembatasan aktivitas di beberapa sektor seperti ketenagakerjaan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan seni, sosial dan budaya, destinasi wisata dan tempat hiburan serta melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Sebagai sebuah organisasi dalam hal ini pemerintah Kota Medan melakukan tahapan awal dalam sebuah perencanaan komunikasi dengan memetakan potensi penyebaran COVID-19 kemudian menuangkannya menjadi sebuah kebijakan tertulis oleh pemerintah Kota Medan melalui surat edaran. Seperti diuraikan (Fergusson, 1999: 43), perencanaan komunikasi pada dasarnya merupakan dokumen penting yang berisikan rencana strategis organisasi dalam menjalankan program kerjanya maupun dokumen yang digunakan dalam hal penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan.

Berikut adalah upaya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam mengkampanyekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) :

a. Komunikasi tatap muka

Walikota Medan mengadakan kunjungan langsung ke lokasi pelayanan masyarakat seperti kantor camat atau pusat layanan dengan berbagai macam segmentasi.

b. Komunikasi melalui media luar ruang

Program komunikasi media luar ruang ialah dengan memanfaatkan reklame atau billboard, spanduk, dan pamflet, Pesan komunikasi berupa pesan ajakan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

c. Komunikasi melalui media online

Dengan adanya internet semakin memudahkan proses penyampaian pesan yang hendak disampaikan. Begitupun yang dilakukan pemerintah kota Medan menggunakan media sosial seperti Website, Twitter, Facebook, Instagram dimanfaatkan untuk penyebarluasan dalam kampanye Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

d. Komunikasi melalui media massa

Televisi sebagai media yang paling dekat dengan masyarakat dapat menyajikan pesan secara visual sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami pesan.

2. Masyarakat sebagai sasaran kegiatan komunikasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Harapan pemerintah Kota Medan dalam rangka kampanye Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas penyebaran pesan melalui media sosial. Meski dalam perjalanannya, masih ditemukannya sekelompok masyarakat yang belum memahami Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut. Akan tetapi usaha yang dilakukan pemerintah Kota Medan untuk melibatkan masyarakat patut diapresiasi.

SIMPULAN

Pandemi COVID-19 bukan perkara mudah bagi seluruh negara dan dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam penanganan bencana ini. Peran pemerintah tetap menjadi yang utama, khususnya dalam kerangka mengomunikasikan berbagai isu, kebijakan serta mekanisme mitigasi penanganan pandemi. Komunikasi sebagai pilar kehidupan digunakan untuk menjaga agar masyarakat tidak panik. Pemerintah Kota Medan dalam rangka kampanye Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengharapkan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta keterlibatan masyarakat dalam penyebaran pesan dan himbauan. Sejatinya komunikasi publik dapat menjadi pengawal, penenang dan saluran penyelesaian informasi publik dalam penanganan pandemi COVID- 19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar S., Idris., Pratama. I., Anis, A. (2020). Exploring the Link between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 11(2), 24-41.
- Amelia, R. Lubis, M.R. & Hardjo, S. (2019). Hubungan Harga Diri Dan Optimisme Dengan Hubungan Gaya Kepemimpinan Dan Moril Kerja Dengan Disiplin Kerja Pada Pegawai/Aparatur Pemerintahan Skpd Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan 1(1) 2019: 69-77,
- Kamariah. (2019). Pengaruh Pemberitaan Media Massa dan Sikap Komunitas LGBT terhadap Self Esteem LGBT di Kota Medan. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 1(2) 2019: 154-160.
- Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
- Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 545-553.
- Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.

- Candrasa, L., Cen, C. C., Cahyadi, W., Cahyadi, L., Pratama, I., (2020). Green Supply Chain, Green Communication and Firm Performance: Empirical Evidence from Thailand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (12), 398-406. doi:10.31838/srp.2020.12.65
- Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (2): 65-81.
- Danilwan, Y., Isnaini, . D. B. Y. & Pratama, . I. (2020) Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 54-60.
- Danilwan, Y.; Isnaini, D. B.; Pratama, I.; Dirhamsyah, D. 2020. Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable performance. A case study, *Journal of Security and Sustainability Issues* 10(Oct): 39-52.
- Ferguson, Sherry Devereaux. 1999. *Communications Planning, An Integrated Approach*. London: Sage Publication.
- Gayuh Satriyo Wibowo. (2021). Pos Penyekatan di Kota Medan Bertambah Jadi 40 Titik, Berikut Daftar Lokasi dan Jam Operasionalnya. Diakses pada 23 juli 2021, dari <https://www.msn.com/id-id/otomotif/berita/pos-penyekatan-di-kota-medan-bertambah-jadi-40-titik-berikut-daftar-lokasi-dan-jam-operasionalnya/ar-AAMlHnc?ocid=uxbndlbing>
- Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., Sulbahrie, R. A. (2019) Impact of Intrinsic Corporate Governance on Financial Performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 7(1), 32-51.
- Handrini A. Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pancemi COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI : Jakarta Pusat. Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020
- Harris Y.P.Sibuea. Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI : Jakarta Pusat. Vol. XIII, No. 13/I/Puslit/Juli/2021
- Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 97-105.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ilahi, P. W. (2020). The Stages, Comparisons And Factors Of First Language Acquisition Of Two-Years-Old Male And Female Child. *Jetli: Journal of English Teaching and Linguistics*, 1(2), 63-73.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ratnasari, M. (2020). Assertive Speech Acts in Mata Najwa Program of Episode Gare-Gare Corona. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 2(1), 53-58.
- Izar, J., Nasution, M. M., Afria, R., & Harianto, N. (2021). Expressive Speech Act in Comic Bintang Emon's Speech in Social Media about Social Distancing. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(1), 148-158.
- Izar, S. L., Nasution, M. M., Izar, J., & Ilahi, P. W. (2021). The The Analysis Of Cooperation Principles Use On Podcast Of Deddy Corbuzier And Nadiem Makarim "Having College Is Not Important. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(1), 23-30.
- Kurniati, R. Menanti, A. & Hardjo, S. (2019). Hubungan Antara Pola Asuh Otoriter dan Kematangan Emosi Dengan Perilaku Agresif Pada Siswa Smp Negeri 2 Medan. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 1(1) 2019: 59-68,
- Levi, Ragnar. (2000). *Medical Journalism: Exposing Fact, Fiction, Fraud*. Sweden: Studentlitteratur, Lund
- Lis Yuliawati. (2021). PPKM Darurat di Medan Dimulai, Kapolda Sumut Ajak Warga Patuhi Aturan. Diakses pada 23 juli 2021, dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1386773-ppkm-darurat-di-medan-dimulai-kapolda-sumut-ajak-warga-patuhi-aturan>
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., Pratami, A. (2019). A Systematic Review of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 6(9), 415-428.
- Lubis, H., Kumar, D., Pratama, I., Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5, pp. 397-405.
- Maggasingang, D., Solong, A., Nadhar, M., Pratama, I. (2020). The Factors Affecting the Corporate Cash Holdings in Listed Firms of Indonesia: Does Corporate Governance Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol* 14(5), 1215-1231.
- Mahmud, metode penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka setia, 2011), hlm. 31

Putri Fatimah, Grace Silalahi, Abdul Halim, & Dedi Sahputra, Perencanaan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J. Sup. Chain. Mgt Vol, 9(1)*, 89-96.
- Moenawar, M. Ghosalie. (2020). "Menjaga Komunikasi Ketika Publik Sensi: Adaptasi Terhadap Napitu, Ulung & Dkk. Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. *Jurnal Community Development. Simalungun. Vol. 2, No. 2 Juni 2021, Hal 232-241.*
- Nasution, M. M., Izar, J., & Afifah, I. H. (2021). An Analysis of Hate Speech Against K-Pop Idols and Their Fans on Instagram and Twitter from The Perspective of Pragmatics. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics, 2(2)*, 91-99.
- Nasution, R. A., Akhyar, S., Aziz, A. (2020). Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dan Dukungan Orangtua Dengan Kemandirian Belajar Siswa Di Sma Dharma Pancasila Medan. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi, 2(1) 2020: 40-47*
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J. Sup. Chain. Mgt Vol, 9(2)*, 920-928.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J. Sup. Chain. Mgt Vol, 9(3)*, 664-673.
- Oktariani. Munir, A., Aziz, A. (2020). Hubungan Self Efficacy Dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Self Regulated Learning Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi, 2(1) 2020: 26-33*
- Pratama, I. (2022). Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 4 (3): 1959-1967*
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N. (2019). *Corporate social responsibility disclosure (CSR) quality in Indonesian public listed companies*. *Polish Journal of Management Studies, 20 (1)*, 359-371.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N., (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 13(4)*, 442-463.
- Pratama, K., Lubis, H., Pratama, I., Samsuddin, S.F., & Pratami, A. (2019). Literature review of corporate social responsibility disclosure. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(5)*, 1397-1403.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía, 45(127)*, 82-91.
- Ramadani, Thoriq, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator. Samarinda. Vol. 15 (1) (2019), 1-18.*
- Sabila, L., Mariatin, E., & Budiman, Z. (2019). Pengaruh Persepsi Gaji dan Iklim Organisasi terhadap Motivasi Kerja Karyawan Sekretaris di PT Prudential Life Assurance Prudance Medan *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi, 1(2) 2019: 170-179.*
- Sahputra, D. (2020). *Sistem Komunikasi Indonesia Dalam Penggunaan Media Massa Dan Media Sosial*. Jakarta: PWI Pusat
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91
- Saragih et al., (2020). *Polish Journal of Management Studies 2020; 21 (2): 384-397*
- Saragih, J., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F., & Tarigan, A. (2020). Can Organizational Justice Dimensions Mediate Between Leader Mindfulness and Leader-Member Exchange Quality: An Empirical Study in Indonesia Pharmaceutical Firms. *Systematic Reviews in Pharmacy, 11(2)*, 545-554.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies, 21 (2)*, 384-397.
- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J. Sup. Chain. Mgt Vol, 9(4)*, 1222-1229.
- Sari, S., Murad, A., Azis, A. (2020). Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Motivasi Belajar Dengan Kedisiplinan Siswa SMA As-Syafi'iyah Medan. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi, 2(1) 2020: 63-68*

- Shareef, M. A., Dwivedi, Y. K., Wright, A., Kumar, V., Sharma, S. K., & Rana, N. P. (2021). Lockdown and sustainability: An effective model of information and communication technology. *Technological Forecasting and Social Change*, 165, 120531.
- Sibuea, M. B.; Sibuea, S. R.; Pratami, A.; Pratama, I.; Nasution, R. 2020. Is business friendliness enhancing energy consumption in the ASEAN region?, *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(M): 409-419.
- Silitonga, K. A. A., Ahmad, . F., Simanjuntak, . C. W. & Atrizka, . D. (2020) Exploring the nexus between the HR practices and work engagement: The mediating role of Job Demand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 342-351. doi:10.31838/srp.2020.7.53
- Simanjuntak, C.W. Lubis, M.R & Hardjo, S. (2019). Model Pengembangan Pelatihan Efikasi Diri, Kepemimpinan Transformasional Terhadap Motivasi Kerja Anggota Satuan Brimob Polda Medan Sumatera Utara. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 1(1) 2019: 1-9,
- Suhardiman. (2021). Sosialisasi Selesai, Pelanggar PPKM Darurat di Medan Akan Ditindak. Diakses pada 23 juli 2021, dari <https://sumut.suara.com/read/2021/07/14/165032/sosialisasi-selesai-pelanggar-ppkm-darurat-di-medan-akan-ditindak>
- Sujianto, Yuliani, F., Syofian, Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (1): 513-530.
- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 40-56.
- Tambunan, R. W., Muchtar, M., Agustian, P., Salim, A., Aisyah, L., Marpaung, B. A., & Nasution, M. M. (2018). Critical discourse: Applying Norman Fairclough theory in recep Tayyip Erdoğan's balcony speech. *Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang*, 6, 174-183.
- Tarigan, R. S. (2016). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol, 7(7), 258-276.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 8(1), 523-535.
- Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama, 2019 Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama
- Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139
- Waspada. (2021). Gubsu minta 6 kepala desa terapkan PPKM mikro. Diakses pada 3 agustus 2021, dari <https://waspada.id/headlines/gubsu-minta-6-kepala-daerah-terapkan-ppkm-mikro/>
- Wheelen, T.L., & Hunger, D.J. 2004. *Strategic Management and Bussines Policy*, Ed 9. United States: Prentice Hall